

kendala pada pencatatan laporan keuangan, dimana sering kali terdapat transaksi yang tidak memiliki bukti valid sehingga sering kali terkendala dalam melakukan pencatatan laporan keuangan kemudian kurangnya pengawasan internal terutama pada pertanggung jawaban yang belum tentu ada setiap bulannya dan kurang maksimalnya kinerja, membuat proses pertanggungjawaban keuangan belum berjalan dengan optimal. Dewan Pengurus Pastoral (DPP) maupun pengurus Komunitas Basis Gereja (KBG) atau lingkungan belum menyadari pentingnya transparansi dan pelaporan yang terstruktur, sehingga keterlibatan Dewan Pengurus Pastoral (DPP) maupun pengurus Komunitas Basis Gereja (KBG) dalam pengawasan dan evaluasi keuangan masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan edukasi keuangan, baik kepada Dewan Pengurus Pastoral (DPP) maupun pengurus Komunitas Basis Gereja (KBG) atau lingkungan, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan gereja yang lebih akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian **"Akuntabilitas Pelaporan dan Pencatatan Keuangan di Paroki Roh Kudus Mabilabol: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan Gereja Katolik"**. Penulis akan berfokus pada peluang dan tantangan yang dalam pencatatan dan pelaporan laporan keuangan yang ada di Paroki Roh Kudus Mabilabol. Adapun alasan Penulis memilih Paroki Roh Kudus Mabilabol dikarenakan Paroki Roh Kudus Mabilabol memiliki pedoman keuangan yang diterapkan oleh Keuskupan Jayapura dalam menerapkan sistem keuangan yang disesuaikan dengan tata kelola keuangan

dan kondisi yang dihadapi oleh paroki. Analisis dilakukan dengan harapan menemukan peluang dan tantangan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan kondisi lapangan dan apa yang dijelaskan dalam pedoman keuangan keuskupan Jayapura. Dengan demikian Penulis berharap hasil penelitian dapat menjadi evaluasi bagi paroki untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan kualitas laporan keuangan Paroki Roh Kudus Mabilabol

1.2 Rumusan Masalah

Paroki sebagai bagian dari organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks Provinsi Papua, khususnya wilayah Keuskupan Jayapura, tingkat pemahaman terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan masih tergolong rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), akses geografis, infrastruktur, serta budaya organisasi yang belum mendukung. Di tengah kondisi tersebut, Paroki Roh Kudus Mabilabol menunjukkan capaian positif dengan telah mampu mandiri secara fiskal. Namun, paroki ini masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pelaporan keuangan dan kesadaran akuntabilitas Dewan Pengurus Pastoral (DPP) serta pengurus Komunitas Basis Gereja (KBG) atau lingkungan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Paroki Roh Kudus Mabilabol dalam penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman keuangan Keuskupan Jayapura.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja peluang Paroki Roh Kudus Mabilabol dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan pencatatan keuangan?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses pelaporan dan pencatatan keuangan?
3. Bagaimana pemahaman bendahara paroki dan Dewan Pengurus Pastoral (DPP) terhadap prinsip akuntabilitas keuangan?
4. Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pelaporan dan pencatatan keuangan di paroki?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi peluang dalam praktik pelaporan dan pencatatan keuangan di Paroki Roh Kudus Mabilabol.
2. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam aspek pelaporan dan pencatatan keuangan.
3. Menilai pemahaman bendahara paroki dan Dewan Pengurus Pastoral (DPP) terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan.
4. Memberikan saran strategis untuk memperkuat sistem pelaporan dan pencatatan keuangan di paroki.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Paroki Roh Kudus Mabilabol dalam menyusun sistem pelaporan dan pencatatan keuangan yang lebih akuntabel. Secara akademik,

hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai praktik keuangan gerejawi, khususnya dalam konteks paroki Roh Kudus Mabilabol Dekanat Pegunungan Bintang.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pelaporan dan pencatatan keuangan yang dilakukan di Paroki Roh Kudus Mabilabol.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Stakeholder Theory

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam karyanya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Teori ini menegaskan bahwa keberlanjutan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan internal, melainkan juga oleh kemampuannya untuk merespons kebutuhan serta kepentingan para pemangku kepentingan. Menurut Ghazali and Chairi (2007)), teori stakeholder menekankan bahwa entitas harus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan karena dukungan mereka berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan hidup organisasi. Penelitian yang dilakukan Bongso and Yunita (2024) menambahkan bahwa teori stakeholder, khususnya dalam konteks organisasi nirlaba, memberikan dasar yang penting bagi penerapan tata kelola yang baik, karena setiap keputusan organisasi, termasuk manajemen keuangan, perlu dipertanggungjawabkan kepada komunitas, manajemen, dan otoritas gereja. Dengan demikian, teori stakeholder menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk membangun hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapannya, teori stakeholder berkaitan erat dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Transparansi menekankan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, akuntabilitas menegaskan kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tanggung jawab

menuntut kesadaran pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan nilai moral, kemandirian menuntut kebebasan pengambilan keputusan tanpa konflik kepentingan, sementara keadilan menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak. Bongso and Yunita (2024) menegaskan bahwa kelima prinsip ini merupakan elemen penting dalam tata kelola gereja yang baik karena menjaga kepercayaan jemaat. Sejalan dengan itu Heimstädt and Dobusch (2020) menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sering kali menjadi ruang etis yang diperdebatkan, sehingga penerapannya memerlukan konsistensi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, teori stakeholder sangat relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam memahami tata kelola organisasi nirlaba, termasuk gereja. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya sekadar aktivitas administratif, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban sosial dan moral kepada para pemangku kepentingan. Melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, organisasi keagamaan dapat memperkuat kepercayaan jemaat dan menjaga kesinambungan pelayanan yang dijalankannya.

2.2 Organisasi Nirlaba dan Gereja Katolik

2.2.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah yang dibentuk secara sadar oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama melalui struktur dan pembagian tugas yang sistematis. Secara umum, organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi yang berorientasi pada keuntungan (profit

organization) dan organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (non-profit organization). Organisasi nirlaba merupakan jenis organisasi yang berfokus pada pelayanan sosial, kemasyarakatan, atau keagamaan, dan bukan pada perolehan laba untuk didistribusikan kepada individu atau kelompok tertentu. Seluruh pendapatan yang diperoleh digunakan kembali untuk mendukung kegiatan dan tujuan utama organisasi tersebut.

Menurut Salamon dan Anheier (1996), organisasi nirlaba memiliki 5 ciri atau sifat yang disebut sebagai *The Five Structural-Operational Definition* yakni:

1. Memiliki stuktur yang formal (*organized*)
2. Terpisah dari pemerintah (*private*)
3. Tidak membagikan keuntungan (*non-profit distributing*)
4. Memiliki pengelolaan sendiri (*self governing*)
5. Keterlibatan sukarela di Masyarakat (*voluntary*)

2.2.2 Tipe-tipe Organisasi

Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik dan unik yang menjadi impian atau visi misi. Dikutip dari Mahsun (2006) terdapat empat jenis organisasi, yakni (1) *pure-profit organization*, (2) *quasi-profit organization*, (3) *quasi-nonprofit organization*, (4) *pure-nonprofit organization*. Berikut ini, penulis uraikan karakteristik dari keempat tipe organisasi diatas:

1. Pure-profit Organization

Tujuan utama dari organisasi tipe ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk memperoleh laba secara maksimal sehingga dapat dinikmati oleh pemilik. Sumber pendanaan organisasi tipe ini berasal dari investor swasta dan kreditor.

2. Quasi-profit Organization

Tujuan utama dari organisasi tipe ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk memperoleh laba maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan pemilik. Sumber dana organisasi tipe ini adalah investor swasta, investor pemerintah, kreditor, dan kas anggota

3. Quasi-nonprofit Organization

Tujuan utama dari organisasi tipe ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan. Sumber dana organisasi tipe ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor

4. Pure-nonprofit Organization

Tujuan organisasi dari organisasi tipe ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa sepenuhnya untuk melayani masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber dana organisasi tipe ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan aset negara dan sejenisnya.

2.2.3 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah organisasi nirlaba yang tujuan utamanya adalah menyediakan layanan di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan. Salah satu karakteristik organisasi ini adalah pengelolaan sumber dayanya, yang menggunakan kembali hasil kegiatannya untuk mencapai misi keseluruhannya. Organisasi nirlaba memainkan peran strategis dalam mencakup bidang layanan publik yang tidak selalu dapat diakses oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Oleh karena itu, organisasi nirlaba juga diharuskan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua kegiatannya. Menurut Faiz (2020) organisasi nirlaba merupakan jenis organisasi yang tidak berorientasi perolehan laba dalam kegiatan utamanya. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Organisasi nirlaba tidak memiliki perolehan laba (*earn profit*), menghasilkan laba dan tidak